



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



 Pertanian dan Pangan  DIPERPA BADUNG  [diperpa@badungkab.go.id](mailto:diperpa@badungkab.go.id)

 [Diperpa\\_badung](https://www.instagram.com/diperpa_badung)  <https://diperpa.badungkab.go.id/>

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan LkjIP Tahun 2022 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pertanggungjawaban Kinerja Pembangunan di Bidang Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022, yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama untuk pencapaian 4 sasaran strategis dengan di dukung 7 Program, 19 Kegiatan serta 37 Sub Kegiatan.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu usul, saran dan masukan dari semua pihak untuk upaya perbaikan sangat kami hargai, namun secara umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selama Tahun 2022 sebagai implementasi dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Mangupura, 28 Maret 2023  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Badung,  
  
Wayan Wijana S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671004 198812 1 001



DAFTAR ISI

|                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                         | I       |
| DAFTAR ISI .....                                                             | li      |
| DAFTAR TABEL .....                                                           | iii     |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                          | iv      |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                    | V       |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                     | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                     | 1       |
| 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan<br>Kabupaten Badung ..... | 2       |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                                      | 5       |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                             | 6       |
| 2.1 Rencana Strategis .....                                                  | 6       |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama .....                                            | 8       |
| 2.3 Rencana Kerja .....                                                      | 8       |
| 2.4 Perjanjian Kinerja .....                                                 | 13      |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....                                         | 15      |
| 3.1 Pengukuran Kinerja .....                                                 | 15      |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja .....                                           | 16      |
| 3.3 Aspek Keuangan .....                                                     | 25      |
| 3.4 Prestasi yang diraih .....                                               | 30      |
| BAB IV. PENUTUP .....                                                        | 31      |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                         | 31      |
| 4.2 Rekomendasi .....                                                        | 32      |
| 4.3 Program Inovasi.....                                                     | 33      |

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                     | Halaman |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja U t a m a Dinas Pertanian danPangan<br>Kabupaten Badung Tahun 2022<br>.....       | 12      |
| Tabel 2.2 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan<br>Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 .....     | 12      |
| Tabel 2.3 | Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan<br>Pangan KabupatenBadung Tahun 2022..... | 21      |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran DinasPertanian<br>dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 .....    | 25      |

**DAFTAR GRAFIK**

|           |                                          | Halaman |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| Grafik 1. | Capaian Kinerja Tahun 2022.....          | VI      |
| Grafik 2. | Produksi Komulatif Pangan Strategis..... | 16      |
| Grafik 3. | Produksi Komulatif Pangan Strategis..... | 19      |
| Grafik 4. | Indeks Pertanaman.....                   | 22      |

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

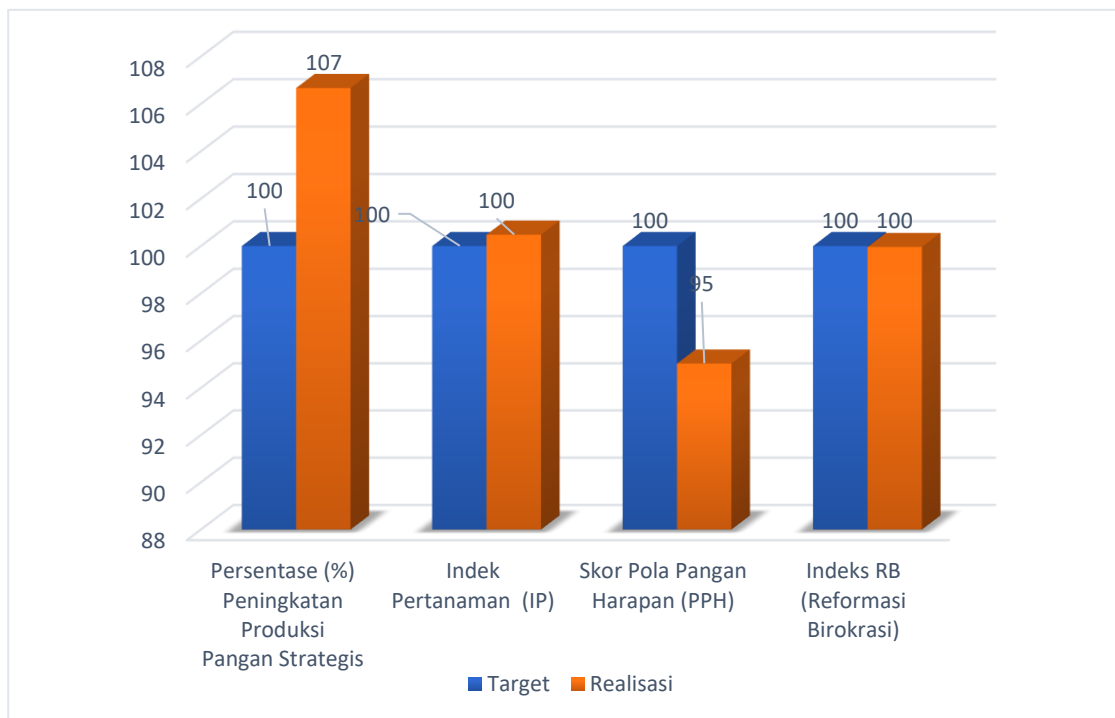
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah selama kurun waktu satu tahun anggaran. LkjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijelaskan pula pertanggungjawaban pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2021-2026 sebagai implementasi dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung (DIPERPA) dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanian dan pangan dituntut mampu memberikan kontribusi atas pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Target Kinerja dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, serta ikut bertanggungjawab mewujudkan Misi 8 yaitu Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Secara umum capaian kinerja kinerja RJMD sudah tercapai sesuai target sehingga sudah dilakukan revisi target. Begitu pula capaian kinerja atas sasaran dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menunjukan kinerja yang baik. Dari 4 (Empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja tahun 2022 rata-rata 101,26% dengan rincian 2 (Dua) indikator dapat mencapai target dan 2 (Dua) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19, perubahan cuaca yang ekstrem serta perbaikan saluran irigasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Secara ringkas capaian kinerja tahun 2022 masing-masing indikator seperti diagram berikut :

## CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2022



Berdasarkan kategori capaian kinerja tersebut diatas, capaian 2 (dua) indikator kinerja termasuk dalam katagori sangat tinggi, 2 (dua) indikator dalam kategori tinggi .Adapun alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 53.984.181.951,-.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas program/kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalni kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan luas tanam, produksi dan memperluas akses pemasaran.

Melaksanakan program inovasi untuk meningkatkan pelayanan melalui program Badung Go Tani, Matanabe, Mangupura Vet Care, pembangunan Display Kopi dan melaksanakan pasar Mini Tani.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan hal ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, maka pengukuran terhadap kinerja sangat penting untuk dilakukan. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan adanya indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



## **1.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung**

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, terdiri dari :

### **1. Kepala Dinas**

### **2. Sekretariat**

- a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
- b. Analis Kepegawaian Ahli Muda
- c. Perencana Ahli Muda

### **3. Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian**

- a. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda
- b. Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda
- c. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda

### **4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

## **5. Bidang Perkebunan**

- a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

## **6. Bidang Peternakan**

- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

## **7. Bidang Kesehatan Hewan**

- a. Medik Veteriner Ahli Muda
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

## **8. Bidang Pangan Dan Penyuluhan**

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan

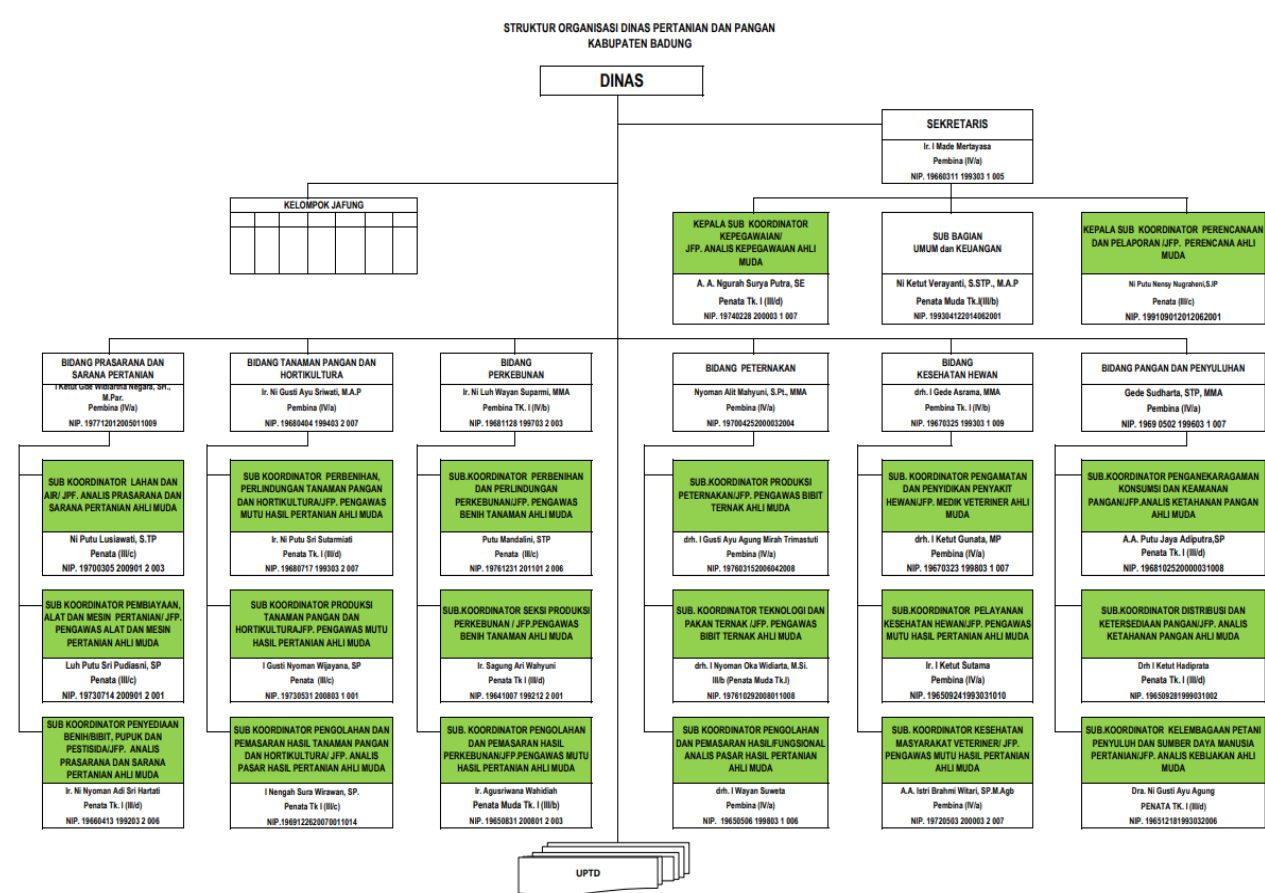
## **9. Unit Pelaksana Teknis Di 6 Kecamatan**

- a. Kepala Uptd Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
- b. Kepala Uptd Balai Benih Utama Padi, Palawija Dan Hortikultura
- c. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Mengwi
- d. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Petang
- e. Kepala Uptd Rumah Potong Hewan
- f. Kepala Uptd Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum

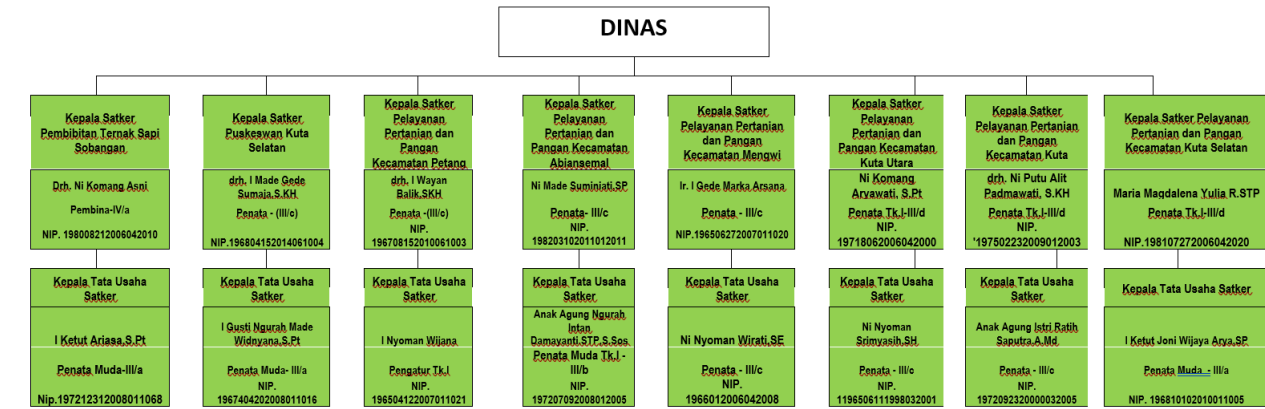
## **10. Satuan Kerja (SATKER)**

- a. Satker Pembibitan Ternak Sapi Sobangan
- b. Satker Puskesmas Kuta Selatan
- c. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Petang
- d. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Abiansemai
- e. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Mengwi
- f. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Utara
- g. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta
- h. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Selatan

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenBadung dapat dilihat dalam gambar berikut :



SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG



### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LKjIP mencerminkan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi Bupati Badung dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, maka pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 4 Sasaran 4 indikator Kinerja yang ingin dicapai, dengan dukungan 7 Program, 19 Kegiatan serta 37 Sub Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2022.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/ pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis perangkat daerah 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut : Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Selain mendukung program strategis nasional, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendukung program strategis sektoral yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 adalah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali era baru.

Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah: Mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani. Arah Kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatnya produksi pangan pokok
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian Krama Bali
4. Meningkatnya Produktivitas Ternak
5. Meningkatnya kesehatan hewan secara berkelanjutan
6. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berusaha menyelaraskan Misi dan Sasaran yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provisi Bali meskipun dengan nomenklatur bahasa yang berbeda tetapi arti yang sama disesuaikan dengan target pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati – Wakil Bupati Badung terpilih Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan sistematis dan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021-2026 digunakan

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi dan misi Bupati Badung serta tujuan organisasi. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah **”Tri Hita Karana”**, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Pangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 ,ditetapkan Visi Kabupaten Badung yaitu: **“MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA ”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 Misi (Misi 2021-2026 ) Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam mewujudkan visi Kabupaten Badung mengacu dan mendukung **misi 8 :**

**“Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”**

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan.

Adapun Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

**“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”**

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2016 – 2022 adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran, yaitu :



- 1 Meningkatnya Produksi Pangan Strategis
- 2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
- 3 Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
- 4 Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Adapun korelasi antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tujuan:                                 | Sasaran :                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis<br><br>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan<br><br>Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan<br><br>Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian |

### 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                 |       |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis  | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15% |
| 2. | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan          | a. Indek Pertanaman (IP)                                | 2,08  |
| 3. | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan       | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                       | 95,97 |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)                      | 24,95 |

2.3. Rencana Kinerja

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2022 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.53.984.181.951 yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- :
- Rp. 1,243,981,581
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- :
- Rp. 52.749.200.370

Adapun rinciannya Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

| Kode |   |      |   | PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                          | Target       | Pagu              |
|------|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| (1)  |   |      |   | (2)                                                                                                                                                       |              |                   |
|      |   |      |   | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                                                                                |              | 53.984.181.951,00 |
| 2    | 9 |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                         |              | 1.243.981.581,00  |
| 2    | 9 | 3    |   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                         | 100%         | 1.243.981.581,00  |
| 2.9  | 3 | 2.01 |   | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah /Kota dalam rangka stbilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 50124.66 Ton | 874.185.865,00    |
| 2.9  | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                                                                                | 4 Laporan    | 338.563.331,00    |
| 2.9  | 3 | 2.01 | 2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                              | 2 Laporan    | 535.622.534,00    |
| 2.9  | 3 | 2.04 |   | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                 | 2 Kelompok   | 369.795.716,00    |
| 2.9  | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                 | 12 Kelompok  | 369.795.716,00    |
|      |   |      |   |                                                                                                                                                           |              |                   |
|      |   |      |   |                                                                                                                                                           |              |                   |
|      |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                                      |              | 52.740.200.370,00 |
| 3.27 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                               |              | 36.442.177.014,00 |
| 3.27 | 1 | 2.01 |   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | 7 Dokumen    | 10.288.094,00     |

|             |          |              |    |                                                                                                                 |                   |                          |
|-------------|----------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3.27        | 1        | 2.01         | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 3 Dokumen         | 5.833.928,00             |
| 3.27        | 1        | 2.01         | 7  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 4 Dokumen         | 4.454.166,00             |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.02</b>  |    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                          | 2240 Orang/bulan  | <b>31.299.952.996,00</b> |
| 3.27        | 1        | 2.02         | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 2240 Orang/bulan  | 31.299.952.996,00        |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.05</b>  |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>100%</b>       | <b>2.383.413,00</b>      |
| 3.27        | 1        | 2.05         | 5  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | 4 Dokumen         | 2.383.413,00             |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.06</b>  |    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>41 Paket</b>   | <b>604.176.455,00</b>    |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 13 Paket          | 10.648.440,00            |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 1 Paket           | 58.954.549,00            |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 13 Paket          | 29.246.746,00            |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 13 Paket          | 378.993.498,00           |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 13 Paket          | 27.333.222,00            |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1 Paket           | 99.000.000,00            |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>02.07</b> |    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>100%</b>       | <b>1.874.891.434,00</b>  |
| 3.27        | 1        | 02.07        | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10 Unit           | 1.137.909.034,00         |
| 3.27        | 1        | 02.07        | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 1 Unit            | 736.982.400,00           |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.08</b>  |    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>36 Laporan</b> | <b>1.388.709.151,00</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 12 Laporan        | 7.000.000,00             |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 12 Laporan        | 704.489.958,00           |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 12 Laporan        | 677.219.193,00           |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.09</b>  |    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>586 Unit</b>   | <b>1.261.775.471,00</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.09         | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 161 Unit          | 58.923.000,00            |

|      |   |      |   |                                                                                                                                               |                      |                          |
|------|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 3.27 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                      | 412 Unit             | 1.097.646.167,00         |
| 3.27 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                  | 13 Unit              | 105.206.304,00           |
|      |   |      |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                                   | <b>133041,12 Ton</b> | <b>10.086.049.965,00</b> |
| 3.27 | 2 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>                                                                                        | 127 Kelompok         | 6.978.440.703,00         |
| 3.27 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                       | 3 Laporan            | 4.287.685.858,00         |
| 3.27 | 2 | 2.01 | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                            | 8 Laporan            | 2.690.754.845,00         |
| 3.27 | 2 | 2.02 |   | <i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                          | 0.3%                 | 319.636.049,00           |
| 3.27 | 2 | 2.02 | 1 | Penjaminan Kemurnian dan Pelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                                                        | 1 VUB                | 287.437.416,00           |
| 3.27 | 2 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                        | 1 Laporan            | 32.198.633,00            |
| 3.27 | 2 | 2.05 |   | <i>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | 9 Kelompok           | 2.787.973.213,00         |
| 3.27 | 2 | 2.05 | 5 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                           | 1 Ton                | 2.787.973.213,00         |
|      |   |      |   |                                                                                                                                               |                      |                          |
| 3.27 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                                                | <b>20636,67 Ha</b>   | <b>3.007.488.951,00</b>  |
| 3.27 | 3 | 2.02 |   | <i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>                                                                                               | 2 Unit               | 266.693.156,00           |
| 3.27 | 3 | 2.02 | 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                   | 8 Unit               | 39.169.554,00            |
| 3.27 | 3 | 2.02 | 9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                        | 1 Unit               | 227.523.602,00           |
| 3.27 | 3 | 2.03 |   | <i>Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>                                  | 1 Wilayah            | 2.740.795.795,00         |
| 3.27 | 3 | 2.03 | 1 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                               | 1 Laporan            | 2.740.795.795,00         |
| 3.27 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                                                | <b>100%</b>          | <b>1.480.214.452,00</b>  |

|      |   |      |   |                                                                                                                                     |                   |                          |
|------|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 3.27 | 4 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>13 Laporan</i> | <i>1.215.867.246,00</i>  |
| 3.27 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                         | 13 Laporan        | 1.215.867.246,00         |
| 3.27 | 4 | 2.03 |   | <i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>                        | <i>1 Laporan</i>  | <i>129.462.385,00</i>    |
| 3.27 | 4 | 2.03 | 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                           | 1 Laporan         | 129.462.385,00           |
| 3.27 | 4 | 2.04 |   | <i>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>                                          | <i>62 Lokasi</i>  | <i>134.884.821,00</i>    |
| 3.27 | 4 | 2.04 | 3 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis                                                                                              | 1 Laporan         | 103.246.689,00           |
| 3.27 | 4 | 2.04 | 4 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                               | 1 Dokumen         | 31.638.132,00            |
| 3.27 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                    | <b>100%</b>       | <b>162.619.666,00</b>    |
| 3.27 | 5 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>                                                    | <i>405 ha</i>     | <i>162.619.666,00</i>    |
| 3.27 | 5 | 2.01 | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                       | <i>405 ha</i>     | 162.619.666,00           |
| 3.27 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                                                 | <b>100%</b>       | <b>1.561.650.322,00</b>  |
| 3.27 | 7 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>                                                                                    | <i>7488 kali</i>  | <i>1.561.650.322,00</i>  |
| 3.27 | 7 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                        | 5 Unit            | 489.697.377,00           |
| 3.27 | 7 | 2.01 | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                     | 79 Unit           | 269.430.030,00           |
| 3.27 | 7 | 2.01 | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                | 59 Unit           | 802.522.915,00           |
|      |   |      |   |                                                                                                                                     |                   | <b>53.984.181.951,00</b> |

2.4. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja direalisasikan dengan Penetapan kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja.

Dikarenakan adanya recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan situasi APBD Badung yang terpengaruh oleh situasi Covid-19, maka Perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mengalami perubahn seperti pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.3.  
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022

| NO | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                 | TARGET            |                   |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                        |                                                         | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN |
| 1. | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis | a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15 %            | 0,15 %            |
| 2. | Optimalisasi PemanfaatanLahan          | a. Indek Pertanaman (IP)                                | 2,08              | 2,08              |
| 3. | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan      | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                       | 95,97             | 95,97             |
| 4. | Meningkatnya PelayananBidang Pertanian | a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)                      | 24,95             | 24,95             |

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung padatahun 2022 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM                                                                 | ANGGARAN                  |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                                                                         | Induk                     | Perubahan                 |
| 1.  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat       | Rp. 169.541.576           | Rp. 1,243,981,581         |
| 2.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Rp. 31.344.255.756        | Rp. 36,442,177,014        |
| 3.  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Rp. 6.039.342.198         | Rp. 10,086,049,965        |
| 4.  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Rp. 2.754.988.411         | Rp. 3,007,488,951         |
| 5.  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp. 1.554.042.355         | Rp. 1,480,214,452         |
| 6.  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Rp. 91.657.476            | Rp. 162,619,666           |
| 7.  | Program Penyuluhan Pertanian                                            | Rp. 1.270.909.497         | Rp. 1,561,650,322         |
|     | <b>Total</b>                                                            | <b>Rp. 43.224.737.269</b> | <b>Rp. 53.984.181.951</b> |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi perangkat daerah, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, diperoleh hasil kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO | SASARAN                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA                              | CAPAIAN KINERJA 2021 | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Produksi Pangan Strategis  | Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | -                    | 0,15 %      | 0,16%          | 106%      |
| 2  | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan          | Indek Pertanaman (IP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | -                    | 2,08        | 2,09           | 104%      |
| 3  | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan       | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                       | -                    | 95,97       | 91,2           | 95,09%    |
| 4  | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | Indeks RB (Reformasi Birokrasi)                      | -                    | 24,95       | 24,94          | 99,95%    |

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

#### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai misi pertama yang tertuang pada Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 yakni **terwujudnya ketahanan pangan** dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, serta sesuai dengan misi yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 yakni, **memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali** memiliki korelasi dengan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 pada sasaran 1 yakni **meningkatnya produksi pangan strategis Kabupaten Badung**. Secara garis besar peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.2.1**  
**Capaian peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri**

| KOMODITI               | CAPAIAN TH 2021   |                |               | CAPAIAN TH 2022   |                |                | % PENINGKATAN |             |              |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
|                        | NASIONAL          | BALI           | BADUNG        | NASIONAL          | BALI           | BADUNG         | NASIONAL      | BALI        | BADUNG       |
| BERAS                  | 31.356.017        | 349.038        | 59.515        | 32.074.045        | 390.155        | 62.821         | 2,29          | 11,78       | 5,55         |
| KOPI                   | 786.200           | 15.600         | 702,86        | 794.800           | 15.600         | 617,11         | 1,09          | -           | 12,20        |
| TELOR (Ayam Petelur)   | 5.155.997,6       | 191.589,1      | 2.095         | 5.566.339,4       | 176.855,4      | 15.333         | 7,96          | 7,69        | 631,89       |
| DAGING AYAM (Pedaging) | 3.185.698,5       | 75.772,7       | 12.633        | 3.765.573,1       | 86.016,5       | 24.807         | 18,20         | 13,52       | 96,37        |
| DAGING SAPI            | 487.802,2         | 4.651          | 1.363         | 498.923,1         | 4.694          | 35.684         | 2,28          | 0,93        | 2.518,30     |
| <b>TOTAL</b>           | <b>40.971.715</b> | <b>636.651</b> | <b>76.309</b> | <b>42.699.681</b> | <b>673.321</b> | <b>139.262</b> | <b>4,22</b>   | <b>5,76</b> | <b>82,50</b> |

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa , Kabupaten Badung berkontribusi terhadap prosentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri sebesar 0,32% atau sebanyak 139.262 Ton dari capaian Nasional yakni 42.699.681 Ton. Peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri di Tahun 2022 diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melaksanakan berbagai strategi seperti penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, menyusun neraca pangan strategis dan serta pemeliharaan jaringan irigasi.

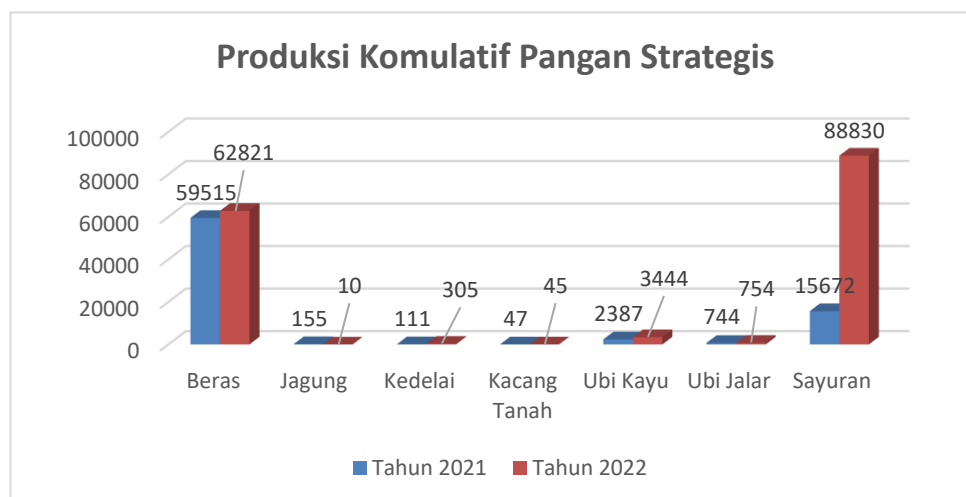
### 3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

#### Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pangan strategis untuk

mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama : Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis

| NO | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                      | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya Produksi Pangan strategis | a.                      | Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis | 0,15 %      | 0,16%          | 106%      |

Target presentase (%) peningkatan produksi pangan strategis Tahun 2022 adalah 0,15% dan terealisasi sebesar 0,16 % dengan presentase 106%. Produksi komulatif pangan strategis Tahun 2021 mencapai 106.620,01 Ton dan di Tahun 2022 mencapai 244.487,46 Ton. Rekapitulasi produksi komulatif pangan (tanaman pangan) strategis dapat dilihat pada diagram berikut :



Tercapainya Indikator **Presentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis** dikarenakan:

1. Adanya pelaksanaan kegiatan demplot tanaman hortikultura Bawang merah dan cabai rawit di subak Sengempel Desa Bongkasa seluas 1 ha. Demplot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman. Melalui kegiatan demplot, petani dapat langsung melihat dan mempraktikkan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul baru, pemupukan dan lain-lain yang dianjurkan sehingga diharapkan menambah pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan petani dalam pelaksanaan budidaya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas.



2. Pelaksanaan Gertam (Gerakan Tanam) Cabai di Subak Serobian Penarungan. Gerakan tanam ini merupakan program jangka pendek dan menengah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam upaya pengendalian mitigasi dampak inflasi.



### 3. Kegiatan Pelatihan Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan teknologi budidaya yang baik dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan (opt) dilahan pertaniannya. Kegiatan Tahun 2022 menyasar kelompok Tani di Kecamatan Mengwi. Dengan pengamatan dan Pengendalian OPT yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman.



### 4. Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Cabai

Salah satu kendala petani dalam pengembangan budi daya cabai adalah mahalnya biaya produksi dan sangat rentan dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) terutama disaat musim panca roba yang berdampak terhadap penurunan produksi dan gagal panen. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung bekerjasama dengan UPTD BTPPHBUN Bali melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama yang ramah lingkungan bertempat di Kelompok Tani Manik Pertiwi Desa Penarungan Kecamatan Mengwi

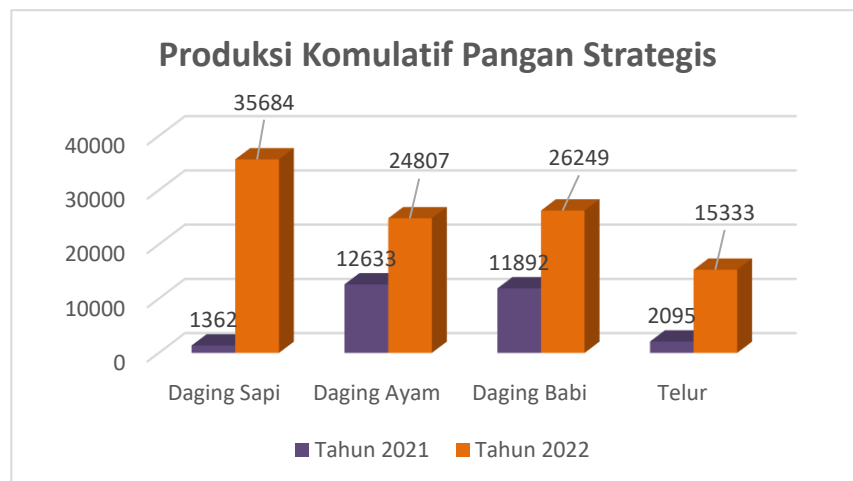




5. Bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, embung, jalan produksi, pemberian bantuan alat pertanian berat seperti cultivator, traktor dan pompa air. Total bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat adalah sebanyak 77 unit. Selain itu, juga diberikan pelatihan operator alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang diikuti 30 orang petani se Badung bertempat di Subak Pedahanan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal.



Rekapitulasi produksi komulatif pangan strategis (daging dan telur) dapat dilihat pada diagram berikut :



Terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap produksi pangan strategis khususnya produksi daging dan telur. Ini disebabkan salah satunya karena memasuki tahun 2022, ekonomi Kabupaten Badung mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya sektor pertanian yang menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah menggeser pola konsumsi dengan penyediaan produk pangan ternak yang lebih besar.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi diatas, tercapainya Indikator Presentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis juga disebabkan karena strategi Dinas Pertanian dan Pangan yakni :

1. Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait inseminasi buatan khusus ternak sapi
2. Kegiatan vaksinasi bagi hewan ternak

Kegiatan vaksinasi kepada hewan ternak ini menysasar hewan ternak tidak hanya sapi melainkan ternak babi. Vaksinasi pada ternak sapi dan babi penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang rentan PMK.

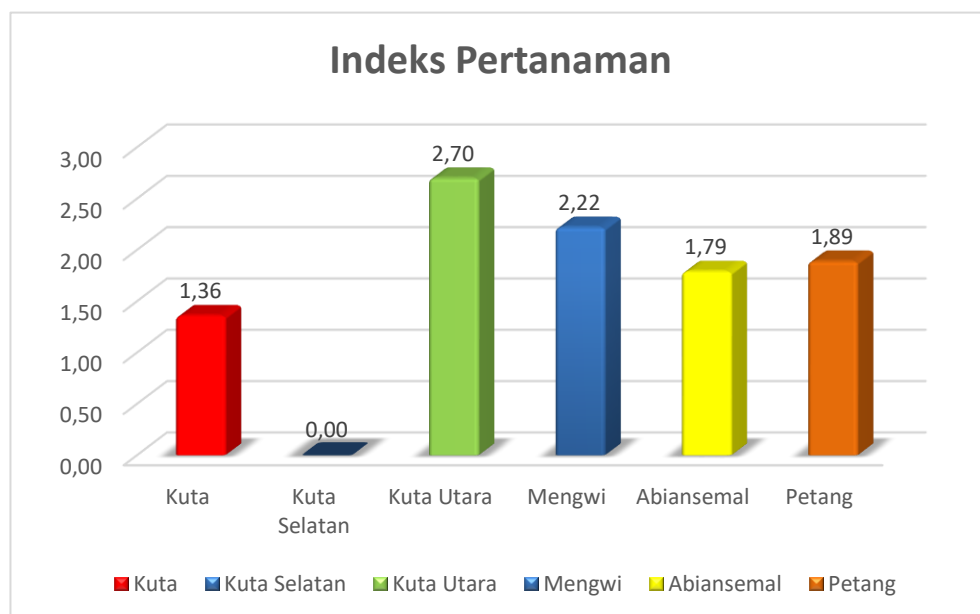


**Sasaran 2 : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan** Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama

| NO | SASARAN                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----|--------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 2  | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan | Indek Pertanaman (IP)   | 2,08        | 2,09           | 100,4%    |

Alih Fungsi Lahan merupakan salah satu tantangan dalam mempertahankan produksi pangan di Kabupaten Badung. Optimalisasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dapat diukur melalui indeks pertanaman. **Indeks Pertanaman** ( IP) merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam sepanjang setahun dengan luas lahan yang ada untuk ditanami. Indikator Kinerja **Indeks Pertanaman** terealisasi sebesar 100,4 % (Tercapai 2,09 Dari target 2,08).

Kenaikan **indeks pertanaman** ( IP) padi ialah salah satu bentuk kinerja Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan produksi padi yakni melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Indeks Pertanaman Kabupaten Badung dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :



Dari diagram diatas bahwa, dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara memiliki indeks pertanaman tertinggi di Tahun 2022 dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan yang tidak memiliki indeks pertanaman, karena tidak terdapat lahan pertanian di wilayah tersebut. Berikut upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Tahun 2022:



### 1. Pelatihan budidaya kakao dan VCO

Adanya permintaan pasar yang tinggi pada kakao menjadikan sosialisasi tentang potensi bisnis kakao di kalangan petani sekaligus pelatihan budidaya kakao sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu pelatihan ini juga dapat meningkatkan optimalisasi terhadap lahan-lahan pertanian yang tidak digunakan.



### 2. Keanekaragaman budidaya tanaman pangan dan hortikultura (Kegiatan sosialisasi Pola Tanam)

Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Sehingga kegiatan ini dapat secara efektif meningkatkan kesuburan tanah (optimalisasi lahan)

**Sasaran 3 : Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan.** Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

| NO | SASARAN                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 3  | Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan | a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 95,97       | 91,2           | 95,09%    |

Skor Pola Pangan Harapan merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan data susenas yang telah diolah melalui aplikasi harmonisasi Pola Pangan Harapan Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung mengalami peningkatan Pada Tahun 2021 Skor PPH Kabupaten Badung Sebesar 84,6 dan Pada Tahun 2022 menjadi sebesar 91,2, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Kelompok Pangan     | Berat Pangan<br>Gram/Kapita/Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |       |         |       |             |          |           |          |
|----|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
|    |                     |                                  | Kkal/Kapita                                | %     | % AKE*) | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH |
| 1  | Padi-padian         | 366,2                            | 1.417                                      | 63,6  | 67,5    | 0,5   | 31,8        | 33,7     | 25,0      | 25,0     |
| 2  | Umbi-umbian         | 44,2                             | 52                                         | 2,3   | 2,5     | 0,5   | 1,2         | 1,2      | 2,5       | 1,2      |
| 3  | Pangan Hewani       | 117,0                            | 237                                        | 10,6  | 11,3    | 2,0   | 21,2        | 22,5     | 24,0      | 22,5     |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 21,4                             | 193                                        | 8,6   | 9,2     | 0,5   | 4,3         | 4,6      | 5,0       | 4,6      |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 2,5                              | 14                                         | 0,7   | 0,7     | 0,5   | 0,3         | 0,3      | 1,0       | 0,3      |
| 6  | Kacang-kacangan     | 27,0                             | 66                                         | 3,0   | 3,2     | 2,0   | 5,9         | 6,3      | 10,0      | 6,3      |
| 7  | Gula                | 13,3                             | 49                                         | 2,2   | 2,3     | 0,5   | 1,1         | 1,2      | 2,5       | 1,2      |
| 8  | Sayur dan Buah      | 282,7                            | 141                                        | 6,3   | 6,7     | 5,0   | 31,6        | 33,6     | 30,0      | 30,0     |
| 9  | Lain-lain           | 83,1                             | 60                                         | 2,7   | 2,9     | -     | -           | -        | -         | -        |
|    | Total               |                                  | 2.229                                      | 100,0 | 106,1   |       | 97,5        | 103,5    | 100,0     | 91,2     |

Kenaikan Skor PPH yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya peningkatan pola konsumsi pangan yaitu pada konsumsi umbian-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah dan juga disebabkan karena menurunkan konsumsi kelompok padi padian.

Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi target yang diharapkan sehingga perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung seperti Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal, Edukasi Pangan Lokal B2SA terhadap usia dini atau masyarakat dan Program Pengembangan dapur B2SA di setiap desa.

**Sasaran 4** : Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

| NO | SASARAN                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 4  | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | Indeks RB               | 24,95       | 24,94          | 99,95%    |

Realisasi Indikator Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi (RB)** sebesar

24,94 dari target capaian nilai 24,95 (Tercapai 99,95%) . Dari hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh inspektorat , memperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Aspek pemenuhan memperoleh nilai 9,66% dari bobot yang ditetapkan 14,60%
- b. Aspek reformasi memperoleh nilai 15,28% dari bobot yang ditetapkan sebesar 21,70%

Dari dua aspek yang menjadi fokus penilaian , untuk dapat memenuhi target yang diharapkan perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi , salah satunya dengan mendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berbasis elektronik secara lebih efektif di Tahun berikutnya, upaya tersebut sudah dilakukan, dengan merancang sistem “aplikasi Bang Goni” bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Badung dan merancang sistem aplikasi “Sampi Digital” bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.



**Badung Go Tani**



### 3.2. Aspek Keuangan

Untuk Merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan dana dengan gambaran sebagai berikut :

| Kode | PERANGKAT DAERAH           | Realisasi Keuangan |                   |      |
|------|----------------------------|--------------------|-------------------|------|
|      |                            | Pagu               | Realisasi         | %    |
| (1)  | (2)                        | (6)                | (7)               | (8)  |
|      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 53.984.181.951,00  | 44.259.326.857,00 | 80,1 |

|      |   |      |   |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |        |
|------|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 2    | 9 |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN                                                                                                                                                 | 1.243.981.581,00  | 1.059.892.447,00  | 85,20  |
| 2    | 9 | 3    |   | PROGRAM PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI DAN<br>KETAHANAN PANGAN<br>MASYARAKAT                                                                                                           | 1.243.981.581,00  | 1.059.892.447,00  | 85,20  |
| 2.9  | 3 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Penyediaan dan<br/>Penyaluran Pangan Pokok<br/>atau Pangan Lainnya sesuai<br/>dengan Kebutuhan daerah<br/>/Kota dalam rangka stbilisasi<br/>Pasokan dan Harga Pangan</i> | 874.185.865,00    | 710.488.012,00    | 81,27  |
| 2.9  | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Informasi Harga<br>Pangan dan Neraca<br>Bahan Makanan                                                                                                                     | 338.563.331,00    | 287.947.896,00    | 85,05  |
| 2.9  | 3 | 2.01 | 2 | Penyediaan Pangan Berbasis<br>Sumber Daya Lokal                                                                                                                                      | 535.622.534,00    | 422.540.116,00    | 78,89  |
| 2.9  | 3 | 2.04 |   | <i>Kegiatan Pelaksanaan<br/>Pencapaian Target Konsumsi<br/>Pangan Perkapita/Tahun<br/>sesuai dengan Angka<br/>Kecukupan Gizi</i>                                                     | 369.795.716,00    | 349.404.435,00    | 94,49  |
| 2.9  | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat<br>dalam Penganekaragaman<br>Konsumsi Pangan Berbasis<br>Sumber Daya Lokal                                                                                   | 369.795.716,00    | 349.404.435,00    | 94,49  |
|      |   |      |   |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |        |
|      |   |      |   |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |        |
|      |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANIAN                                                                                                                                              | 52.740.200.370,00 | 43.199.434.410,00 | 81,91  |
| 3.27 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                    | 36.442.177.014,00 | 29.948.925.153,00 | 82,18  |
| 3.27 | 1 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Perencanaan,<br/>Panganggaran, dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i>                                                                                             | 10.288.094,00     | 9.775.148,00      | 95,01  |
| 3.27 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                | 5.833.928,00      | 5.833.928,00      | 100,00 |
| 3.27 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                 | 4.454.166,00      | 3.941.220,00      | 88,48  |
| 3.27 | 1 | 2.02 |   | <i>Kegiatan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>                                                                                                                           | 31.299.952.996,00 | 25.445.204.207,00 | 81,29  |
| 3.27 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                                 | 31.299.952.996,00 | 25.445.204.207,00 | 81,29  |

|             |          |              |    |                                                                                                                 |                         |                         |               |
|-------------|----------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.05</b>  |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>2.383.413,00</b>     | <b>2.347.311,00</b>     | <b>98,49</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.05         | 5  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | 2.383.413,00            | 2.347.311,00            | <b>98,49</b>  |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.06</b>  |    | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>604.176.455,00</b>   | <b>568.007.703,00</b>   | <b>94,01</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.648.440,00           | 10.524.000,00           | <b>98,83</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 58.954.549,00           | 54.562.703,00           | <b>92,55</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 29.246.746,00           | 27.176.000,00           | <b>92,92</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 378.993.498,00          | 351.405.000,00          | <b>92,72</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 27.333.222,00           | 25.340.000,00           | <b>92,71</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.06         | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 99.000.000,00           | 99.000.000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>02.07</b> |    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>1.874.891.434,00</b> | <b>1.779.344.294,00</b> | <b>94,90</b>  |
| 3.27        | 1        | 02.07        | 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1.137.909.034,00        | 1.054.333.422,00        | <b>92,66</b>  |
| 3.27        | 1        | 02.07        | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 736.982.400,00          | 725.010.872,00          | <b>98,38</b>  |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.08</b>  |    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>1.388.709.151,00</b> | <b>1.134.383.323,00</b> | <b>81,69</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.000.000,00            | 7.000.000,00            | <b>100,00</b> |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 704.489.958,00          | 457.489.248,00          | <b>64,94</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.08         | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 677.219.193,00          | 669.894.075,00          | <b>98,92</b>  |
| <b>3.27</b> | <b>1</b> | <b>2.09</b>  |    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>1.261.775.471,00</b> | <b>1.009.863.167,00</b> | <b>80,04</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.09         | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 58.923.000,00           | 29.712.100,00           | <b>50,43</b>  |
| 3.27        | 1        | 2.09         | 6  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 1.097.646.167,00        | 922.134.717,00          | <b>84,01</b>  |

|             |          |             |   |                                                                                                                                               |                          |                         |              |
|-------------|----------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 3.27        | 1        | 2.09        | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                  | 105.206.304,00           | 58.016.350,00           | 55,15        |
|             |          |             |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                                   | <b>10.086.049.965,00</b> | <b>6.339.962.670,00</b> | <b>62,86</b> |
| <b>3.27</b> | <b>2</b> | <b>2.01</b> |   | <b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                                        | <b>6.978.440.703,00</b>  | <b>5.533.989.574,00</b> | 79,30        |
| 3.27        | 2        | 2.01        | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                       | 4.287.685.858,00         | 3.724.755.310,00        | 86,87        |
| 3.27        | 2        | 2.01        | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                            | 2.690.754.845,00         | 1.809.234.264,00        | 67,24        |
| <b>3.27</b> | <b>2</b> | <b>2.02</b> |   | <b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                          | <b>319.636.049,00</b>    | <b>319.352.470,00</b>   | 99,91        |
| 3.27        | 2        | 2.02        | 1 | Penjaminan Kemurnian dan Pelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                                                        | 287.437.416,00           | 287.398.573,00          | 99,99        |
| 3.27        | 2        | 2.02        | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                        | 32.198.633,00            | 31.953.897,00           | 99,24        |
| 3.27        | 2        | 2.05        |   | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>2.787.973.213,00</b>  | <b>486.620.626,00</b>   | 17,45        |
| 3.27        | 2        | 2.05        | 5 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                           | 2.787.973.213,00         | 486.620.626,00          | 17,45        |
|             |          |             |   |                                                                                                                                               |                          |                         |              |
| <b>3.27</b> | <b>3</b> |             |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                                                | <b>3.007.488.951,00</b>  | <b>2.892.561.227,00</b> | 96,18        |
| <b>3.27</b> | <b>3</b> | <b>2.02</b> |   | <b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                               | <b>266.693.156,00</b>    | <b>261.090.851,00</b>   | 97,90        |
| 3.27        | 3        | 2.02        | 3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                        | 39.169.554,00            | 38.392.200,00           | 98,02        |
| 3.27        | 3        | 2.02        | 9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                        | 227.523.602,00           | 222.698.651,00          | 97,88        |
| <b>3.27</b> | <b>3</b> | <b>2.03</b> |   | <b>Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                  | <b>2.740.795.795,00</b>  | <b>2.631.470.376,00</b> | 96,01        |

|      |   |      |   |                                                                                                                                     |                         |                         |              |
|------|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 3.27 | 3 | 2.03 | 1 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                     | 2.740.795.795,00        | 2.631.470.376,00        | 96,01        |
| 3.27 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                                      | <b>1.480.214.452,00</b> | <b>1.203.319.323,00</b> | <b>81,29</b> |
| 3.27 | 4 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i> | <b>1.215.867.246,00</b> | 955.356.887,00          | <b>78,57</b> |
| 3.27 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                                         | 1.215.867.246,00        | 955.356.887,00          | <b>78,57</b> |
| 3.27 | 4 | 2.03 |   | <i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>                        | <b>129.462.385,00</b>   | 119.253.152,00          | <b>92,11</b> |
| 3.27 | 4 | 2.03 | 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                           | 129.462.385,00          | 119.253.152,00          | <b>92,11</b> |
| 3.27 | 4 | 2.04 |   | <i>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>                                          | <b>134.884.821,00</b>   | 128.709.284,00          | <b>95,42</b> |
| 3.27 | 4 | 2.04 | 3 | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis                                                                                              | 103.246.689,00          | 97.077.927,00           | <b>94,03</b> |
| 3.27 | 4 | 2.04 | 4 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                               | 31.638.132,00           | 31.631.357,00           | <b>99,98</b> |
| 3.27 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                    | <b>162.619.666,00</b>   | <b>142.079.466,00</b>   | <b>87,37</b> |
| 3.27 | 5 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>                                                    | <b>162.619.666,00</b>   | <b>142.079.466,00</b>   | <b>87,37</b> |
| 3.27 | 5 | 2.01 | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                       | 162.619.666,00          | 142.079.466,00          | <b>87,37</b> |
| 3.27 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                                                 | <b>1.561.650.322,00</b> | <b>1.421.646.084,00</b> | <b>91,03</b> |
| 3.27 | 7 | 2.01 |   | <i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>                                                                                    | <b>1.561.650.322,00</b> | <b>1.421.646.084,00</b> | <b>91,03</b> |
| 3.27 | 7 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                        | 489.697.377,00          | 454.682.724,00          | <b>92,85</b> |



|      |   |      |   |                                                                      |                   |                   |       |
|------|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 3.27 | 7 | 2.01 | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa      | 269.430.030,00    | 252.974.398,00    | 93,89 |
| 3.27 | 7 | 2.01 | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 802.522.915,00    | 713.988.962,00    | 88,97 |
|      |   |      |   |                                                                      | 53.984.181.951,00 | 44.259.326.857,00 | 80,1  |

Dari gambaran aspek keuangan diatas , terdapat sub kegiatan dengan nilai realisasi keuangan sangat rendah yakni sub kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disebabkan karena terkendala pada proses administrasi persetujuan hibah kepada kelompok ternak, dan untuk selebihnya sisa anggaran yang tidak terelaisasi adalah merupakan efisiensi pada saat proses pengadaan barang/jasa namun dapat dipastikan secara realisasi fisik dapat mencapai target.

### 3.3. Prestasi Yang Diraih

Prestasi yang diraih selama tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung antara lain :

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif
2. BPP Berprestasi Peringkat II (Kedua Tingkat Provinsi Bali Tahun 2022
3. Kabupaten dengan Indeks Ketahanan Pangan Terbaik II Tahun 2022



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun sebagai jabaran visi dan misi kepala daerah serta strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (Empat) indikator.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 4 (Empat) indikator kinerja, 2 (dua) indikator dapat mencapai target dan 2 (dua) indikator tidak dapat mencapai target. Capaian dari masing-masing target yaitu :
  - a. Peningkatan Produksi Pangan Strategis Persentase (%) Peningkatan Produksi yakni 106%
  - b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan yakni 104%
  - c. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yakni 95,09%
  - d. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian yakni 99,95 %
2. Dilihat dari skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian 2 (Dua) indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat tinggi, 2 (dua) indikator dalam kategori tinggi.
3. Tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan disamping karena target yang dipasang untuk skor pola pangan harapan adalah target hasil sensus yang bekerjasama dengan Institusi yang khusus menangani masalah gizi melalui kegiatan yang diprogramkan di Dinas Pertanian dan Pangan, tetapi di Tahun 2022 anggaran tersebut di refocusing. Selain itu belum maksimalnya penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

## 4.2 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan dana CSR.
4. Merintis kerjasama dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses pemasaran.
5. Merancang berbagai program terobosan / inovasi khususnya dengan memanfaatkan sistem informasi/elektronik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

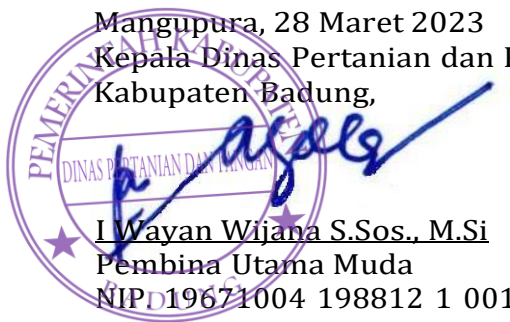
Demikian semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

### 4.3 Program Inovasi

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan mengembangkan program-program inovasi sesuai dengan kewenangan yaitu :

1. Inovasi MATANABE (Masyarakat Tanam Cabe) , Antisipasi kenaikan harga cabai
2. Inovasi sistem aplikasi Bang GoNi (Badung Go Tani)
3. Inovasi BANG ROMI (Badung Promo Tani)
4. Inovasi Mangupura Vet Klinik
5. Inovasi SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani)
6. Inovasi TAK GIGIT HABIS (Tata Laksana Gigitan Hewan Rabies)
7. Inovasi Si-Traktor (Sistem Informasi Dan Tatalaksana Rekomendasi Solar Untuk Traktor)

Mangupura, 28 Maret 2023  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Badung,



I Wayan Wijana S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671004 198812 1 001